

KONSEP DASAR KOMUNIKASI POLITIK

Marzuki¹, Lia Agita Sari², Fitriani³

[¹marzuki1100000173@uinsu.ac.id](mailto:marzuki1100000173@uinsu.ac.id), [²agita0404222053@uinsu.id](mailto:agita0404222053@uinsu.id), [³fitriani0404222034@uinsu.ac.id](mailto:fitriani0404222034@uinsu.ac.id)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Artikel ini membahas definisi, elemen, teori, model, serta peran komunikasi politik dalam sistem politik. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji komunikasi politik sebagai proses penyampaian pesan yang bercirikan politik dengan tujuan memengaruhi opini dan tindakan publik. Komunikasi politik melibatkan berbagai elemen seperti komunikator politik, pesan politik, media politik, target politik, serta efek komunikasi yang dihasilkan. Selain itu, teori-teori seperti teori khalayak kepala batu, teori empati dan hemofili, serta teori informasi dan nonverbal turut digunakan untuk memahami dinamika komunikasi politik. Beberapa model komunikasi politik, seperti model deliberatif, media, multikultural, konsensus, dan unggul, dikaji dalam konteks implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik berperan dalam membangun citra politik, membentuk opini publik, serta meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum. Dengan demikian, komunikasi politik merupakan aspek penting dalam proses politik, baik di tingkat domestik maupun dalam hubungan antarnegara.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Elemen Komunikasi, Model Komunikasi Politik.

PENDAHULUAN

Untuk memahami ruang lingkup studi komunikasi politik, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai keeratan antara ilmu komunikasi dan ilmu politik. Dalam satuan ilmu politik, komunikasi merupakan dasar yang perlu dipahami untuk membaca proyeksi dan cara-cara kepentingan berlangsung di tengah agenda dalam ruang khalayak. Ilmu politik tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pengetahuan komunikasi, begitupun komunikasi berada dalam kesatuan sistem dalam serangkaian kegiatan politik.

Komunikasi politik merupakan gabungan antara ilmu komunikasi dan politik dengan fokus yang tajam dalam memahami proses komunikasi publik berlangsung. Hal ini mengacu pada strategi-strategi komunikasi antar pemangku kebijakan dalam menyelenggarakan kepentingannya. Terdapat begitu banyak cara yang terus berkembang seiring perkembangan masyarakat. Berangkat dari perkembangan itu pula, penelitian dan adaptasi komunikasi politik terus dilakukan untuk mengetahui potensi terbaik dalam wacana ilmu komunikasi politik.

Pesan politik yang berkaitan dengan kekuasaan, jalannya pemerintahan, dan kebijakan pemerintahan oleh faktor - faktor politik kepada komunikan melalui instrument atau media atau saluran - saluran komunikasi politik, sehingga bias menghasilkan tanggapan atau balasan dari komunikan. Dalam bagan bangun komunikasi politik terdiri dari fungsi komunikasi politik, proses komunikasi politik, pola-pola komunikasi politik, dan faktor yang mempengaruhinya.

Eksistensi komunikasi politik di dalam sebuah negara menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan langsung dengan system politik di dalam negara yang bersangkutan. Problem tentang hal ini selalu terkait langsung dengan perilaku politik (political behavior) dalam suatu masyarakat luas. Komunikasi di dalam suatu masyarakat luas selalu berkaitan satu terhadap yang secara inheren.

Sebuah komunikasi politik yang baik dan efektif dalam artian mendapat respon secara baik dan sempurna dari publik, hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah

komunikator, pesan, dan media yang dipersiapkan dan digunakan secara sempurna dan dapat menjangkau khalayak luas. Bagi seorang komunikator dan juga pesan politik; kedua hal ini haruslah selalu berkorelasi dan berkesinambungan. Seorang komunikator adalah orang yang harus punya kredibilitas, selalu jelas asal-usulnya dalam menyampaikan pesan politik. Hal ini tentu selain menjaga kredibilitasnya, lebih pesan politik yang disampaikan tetap bermutu dan bisa mengangkat citranya sebagai seorang komunikator yang baik dan handal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur juga sangat familiar dengan sebuah studi pustaka. Sumber Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. sumber yang diteliti tidak boleh sembarangan. Sebab tidak semua penelitian bisa dijadikan acuan. Beberapa yang umum dan layak digunakan adalah buku-buku karya pengarang terpercaya (lebih disarankan karya akademis), jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian mahasiswa dalam berbagai bentuk misalnya, tesis, disertasi, laporan praktikum, dan sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal online nasional dan internasional. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penyaringan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh penulis dari setiap jurnal yang diambil. Secara umum tujuan penggunaan studi literatur ialah antara lain menemukan sebuah masalah guna diteliti, mencari informasi yang relevan, dengan masalah yang akan diteliti serta mengkaji sejumlah teori dasar yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Alasan penulisan ini menggunakan metode studi literatur ialah untuk membantu serta mempermudah dalam mengetahui informasi berupa fakta terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Elemen Komunikasi Politik

1. Definisi Komunikasi Politik

Komunikasi dalam kajian politik dapat dipahami sebagai upaya-upaya pembentukan. Misalnya, kesepakatan menyangkut bagaimana pembagian sumber daya kekuasaan (power sharing) atau bagaimana kesepakatan tersebut dibuat. Sementara komunikasi politik dalam kajian komunikasi politik dalam kajian komunikasi dipahami sebagai pesan bercirikan politik untuk memengaruhi pihak lain dalam pencapaian tujuan yang direncanakan. Dengan demikian, yang pertama. Fokus pada aktivitas politik, sementara yang kedua, fokus pada pesan bercirikan politik. Merujuk pendapat Sumarmo, (dalam Haryanto & Rumaru, 2012 :3) bahwa studi komunikasi politik mencakup dua disiplin ilmu sosial, yakni ilmu politik dan ilmu komunikasi.

Komunikasi politik menurut Mc. Nair adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan politisi untuk meraih tujuan tertentu. Mc. Nair berpendapat bahwa komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga ditujukan kepada para politisi dan pemilih kolomnis surat kabar, serta komunikasi tentang aktor politik dan aktivitas mereka. Sebagaimana terdapat dalam berita, editorial, dan bentuk diskusi politik media lainnya. Sedangkan menurut nimmo, komunikasi politik adalah proses komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan dan tindakan politik terkait dengan persoalan-persoalan politik.

Pengertian komunikasi politik menurut Miriam Budiardjo adalah "Komunikasi politik merupakan fungsi sosialisasi dan budaya politik. Komunikasi yang berjalan

baik menjadi prasyarat sosialisasi politik untuk dapat berjalan dengan baik pula sehingga budaya dapat dilangsungkan dengan baik. Kemudian para ahli komunikasi mendefinisikan bahwa pengertian komunikasi bersumber dari gagasan komunikator yang ingin disampaikan pihak penerima dengan segala daya serta usaha bahkan tipu daya agar pihak penerima mampu untuk memahami serta menerima melalui pesan yang disampaikan.

Dalam komunikasi politik ini (political communication) Rusadi Kantaprawira (dalam Sumarmo, 1987 :9) memfokuskan pada kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijaksanaan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

Definisi lain menurut Komunikasi Politik bahwa: “Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang bercirikan politik kepada khalayak politik, melalui media tertentu yang bertujuan memengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu kepentingan tertentu di masyarakat. Dengan demikian, inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis komunikais tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu.”

Dilihat dari tujuan politik "an sich", maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu di dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuasaan mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan.

Komunikasi politik mempunyai lingkup pembahasan yang sangat luas, tidak hanya membahas bagaimana komunikasi dapat dipergunakan di dalam mencapai kekuasaan dan tujuan politik secara internal tapi juga bagaimana suatu sistem yang berlangsung dapat dipertahankan dan dialih generasikan. Dan dalam kegiatan keluar, bagaimana komunikasi dapat digunakan dalam upaya mempengaruhi negara lain di dalam mencapai tujuan politik negaranya, atau secara minimal dapat terwujudnya suatu hubungan yang saling menguntungkan di antara dua atau lebih negara yang mengadakan komunikasi.

Sampai saat ini, sudah banyak definisi tentang komunikasi politik. Berikut ini adalah beberapa definisi komunikasi politik yang terdapat pada Komunikasi Politik Pada Era Multimedia karya Roni Tabroni dan Shultan Rumaru.

- a. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya itu dijalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan, dan adjudikasi peraturan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi sistem politik (Cabriel Almond and G Bingham Powell, 1976).
- b. Process by which a nation's leadership, media, and citizenry exchange and confer meaning upon messages that relate to the conduct of public policy (Komunikasi politik adalah proses di mana pemimpin bangsa, media, dan warga negara mengubah dan memberi makna pada pesan-pesan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan umum) (Perloff).
- c. Communicatory activity considered political by virtue of its consequences' actual, and potential, that it has for the functioning of political system (Aktivitas komunikasi

dikatakan bersifat politik berdasarkan konsekuensi, kebenaran, dan potensinya yang memiliki fungsi pada sistem politik) (Fagen, 1966).

- d. Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by- or have consequences for the political system (Komunikasi politik memiliki makna setiap perubahan simbol-simbol dan pesan-pesan yang signifikan terhadap suatu keadaan politik atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik) (Meadow, 1980).
- e. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa "penggabungan kepentingan" (interest aggregation) dan "perumusan kepentingan" (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik (Prof. Miriam Budiardjo, 1982).

Para ilmuwan politik memandang bahwa sebenarnya politik memiliki komunikasi karena banyak definisi komunikasi yang telah terdapat oleh politik terutama dikarenakan Komunikasi itu pada umumnya bertujuan untuk mempengaruhi. Sedangkan politik mencakup pengaruh sebagai konsep khusus dari kekuasaan sebagai. Sentral kajian politik. Kemudian menurut Harsono Suwardi komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucap atau dalam sebuah isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu.

Elemen-Elemen Komunikasi Politik

Menurut Hafied Cangara seperti halnya dengan disiplin komunikasi lainnya, maka komunikasi politik sebagai body of knowledge juga terdiri atas berbagai unsur, yakni terdiri dari komunikator (penyampai pesan), message (pesan), komunikan (penerima pesan). Dan Nimmo dalam mengkaji komunikasi politik melibatkan unsur-unsur komunikator politik, pesan politik, media politik, khalayak politik, serta akibat-akibat komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan pembicaraan politik yang melibatkan unsur-unsur komunikasi dengan akibat-akibat politik tertentu. Nimmo Adapun elemen-elemen komunikasi politik adalah:

1. Komunikator Politik

Komunikator politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislative dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi dengan hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik.

2. Pesan Politik

Adalah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun secara terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.

3. Saluran atau Media Politik

Adalah merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh para pakar komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya misalnya media massa dan media elektronik. Dalam saluran komunikasi kelompok termasuk didalamnya partai politik, organisasi profesi, ikatan alumni, organisasi sosial keagamaan, karang taruna sedangkan saluran komunikasi publik termasuk didalamnya aula, balai desa, pameran, sekolah, kampus, panggung kesenian, saluran komunikasi sosial termasuk didalamnya pesta perkawinan, pertunjukan wayang, pesta rakyat, acara sunatan, pesta tani.

4. Sasaran atau Target Politik

Adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan dan lain-lain.

5. Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, di mana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Pemberian suara ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat presiden, Anggota DPR, Gubernur, Anggota DPRD, Bupati.

Teori Komunikasi Politik

Teori dasar dari aplikasi komunikasi politik adalah:

1. Teori khalayak kepala batu

Teori ini mengkaji mengenai faktor-faktor yang membuat individu dapat menerima pesan-pesan komunikasi. Salah satunya adalah lahirnya teori atau model guna dan kepuasan. Kemudian Teori ini dikembangkan oleh ellihucu model ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang sangat rasional dan sangatlah aktif dinamis serta selektif terhadap semua pengaruh dari luar dirinya. Khalayak yang selektif itu akan memilih berdasarkan kegunaan dalam memenuhi kepuasan dirinya.

2. Teori empati dan teori hemofili

Teori empati dikembangkan oleh berlo dan Daniel learner, kemudian teori hemofili diperkenalkan oleh Everett M.Rogers, dan F. Shoemaker. Teori ini merupakan penjabaran dari Paradigma interaksional menurut Daniel learner, empati adalah suatu kesanggupan seseorang melihat dirinya sendiri masuk ke dalam situasi orang lain dan kemudian melakukan suatu penyesuaian. kemudian istilah homofili memiliki arti bahwa berkomunikasi dengan orang yang sama artinya derajat orang yang berkomunikasi memiliki kesamaan dalam beberapa hal hemofili ini dapat digambarkan sebagai suasana atau kondisi kepribadian dan kondisi fisik antara dua orang yang berinteraksi ketika memiliki kebersamaan usia, bahasa, pengetahuan, kepentingan partai, organisasi, agama, Suku bangsa, serta pakaian. Tetapi dalam hal ini bisa menjadi sulit terjadi interaksi yang intensif jika dua orang yang berinteraksi bersifat heterofili, artinya tidak memiliki kesamaan bahasa, pengetahuan serta kepentingan.

Dari adanya empati dan hemofili I ni akan menciptakan suatu bentuk keakraban dan intim sehingga komunikasi politik dapat berjalan secara interaksional dalam hal ini Interaksi dapat terjadi antara dua subjek yang selevel dan sederajat. Dalam komunikasi politik yang bersifat dialogis tidak dikembangkan kata aku dan kamu, melainkan yang ditonjolkan adalah kata kita.

3. Teori Informasi dan teori nonverbal

Teori informasi dan teori non verbal dikembangkan oleh B. Orbray Fisher, informasi menurutnya adalah sebagai suatu pengelompokan peristiwa-peristiwa dengan fungsi dan tujuan tertentu untuk menghilangkan suatu ketidakpastian. Informasi dapat disebut sebagai konsep yang absolut dan relatif karena informasi diartikan bukan sebagai pesan melainkan jumlah, benda, serta energi. Jika dipandang secara singkat arti dari informasi adalah semua hal yang dapat dipakai dalam bertukar pengalaman jadi informasi dalam komunikasi politik dapat diartikan sebagai sikap politik serta pendapat politik, media politik, kostum partai politik, tamu kader partai politik. Maka dari itu, hakikatnya teori informasi adalah suatu komunikasi politik yang bersifat nonverbal atau tidak terucapkan.

Model Komunikasi Politik

Komunikasi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam berkomunikasi, juga dapat digambarkan dalam berbagai macam model. Model komunikasi dibuat untuk membantu dalam memberi pengertian tentang komunikasi, dan juga untuk menspesifikasi bentuk-bentuk komunikasi yang ada dalam hubungan antar manusia.

Ada beberapa model komunikasi politik yang penting untuk dipahami dalam konteks interaksi politik. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa model utama:

1. Model Komunikasi Politik Deliberatif

Model komunikasi ini merupakan aktualisasi dari semangat demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan khususnya adalah demokrasi deliberative. Setidaknya ada lima karakteristik dari komunikasi deliberatif:

- a. adanya pandangan yang berbeda yang dikonfrontasikan;
- b. adanya toleransi dan penghargaan untuk mendengarkan argumentasi orang lain;
- c. terdapat upaya mencapai konsensus dan menghargai perbedaan;
- d. pandangan lama dapat dipertanyakan dan memiliki kesempatan untuk memperdebatkannya;
- e. cakupan untuk berkomunikasi dan kebebasan tanpa kendali.

2. Model Komunikasi Media

Komunikasi ini mengandalkan media untuk menjadi mediasi dan mediatisasi dalam menjembatani semua pihak yang terlibat dalam proses kebijakan publik dan politik antara pemerintah pusat dan daerah. Mediasi merujuk pada meningkatnya penggunaan media teknologi yang dapat mengatasi waktu dan ruang. Hal ini mengacu pada pendapat William yang mencatat bahwa mediasi merupakan (1) bertindak sebagai intermediary, (2) pihak yang menengahi secara tidak langsung pihak-pihak yang berbeda, dan (3) cara formal dalam mengekspresikan langsung ketika hubungan-hubungan lain tidak terekspresikan. Sedangkan mediatisasi sebagai kehadiran media yang tumbuh dalam konstruksi identitas sejak budaya menjadi lebih tergantung pada media komunikasi. Mediatisasi juga mengubah komunikasi manusia dengan memberikan kemungkinan baru dalam berkomunikasi terhadap individu sebagai proses “a man-made one”.

Dengan demikian, ketika media menjadi mediasi maka komunikasi politik yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah atau sebaliknya dijumpai tanpa intervensi media. Maka mediatisasi memperlihatkan meningkatnya institusi politik (pemerintah pusat dan daerah) tergantung dan dibentuk oleh media (massa).

3. Model Komunikasi Multikultur

Model komunikasi multikultural ini dilandasi pada kompetensi komunikasi antar budaya (intercultural communication competence). Kompetensi komunikasi antar budaya memiliki tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan behavioral. Pertama, aspek kognitif. Aspek ini direpresentasikan dengan adanya kesadaran antarbudaya (intercultural awareness) yaitu merujuk pada kemampuan memahami konvensi kultural yang mempengaruhi cara orang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Kedua, aspek afektif. Aspek ini ditunjukkan dengan adanya sensitivitas antarbudaya (intercultural sensitivity) yaitu kemampuan untuk memahami, menghormati, dan mengapresiasi perbedaan kultural di dalam interaksi antar budaya. Ketiga, aspek behavioral. Ini diperlihatkan dengan adanya keefektifan antarbudaya (intercultural effectiveness) yaitu merujuk pada keterampilan berkomunikasi dalam mencapai tujuan tertentu dalam perbedaan kultural. Oleh karena itu kompetensi komunikasi antara budaya merupakan model komunikasi politik pemerintah pusat-daerah dalam kebijakan-kebijakan publik bagi masyarakat majemuk yang memiliki dasar Bhinneka Tunggal Ika.

4. Model Komunikasi Konsensus

Model ini mengacu pada teori negosiasi (negotiation theory). Negosiasi merupakan proses yang mengkombinasikan posisi berkonflik dalam posisi yang seimbang dibawah keputusan aturan “unanimity”. Situasi negosiasi merupakan hubungan saling ketergantungan dengan dua jenis daya tawar. Pertama, daya tawar distributif (distributive bargaining) merupakan perilaku komunikasi yang berorientasi pada “adversary” dan konflik. Setiap pihak berusaha memanipulasi informasi dalam rangka

memperkuat argumentasi untuk memenangkan posisinya. Kedua, daya tawar integratif (integrative bargaining) merupakan moda komunikasi yang menyelesaikan masalah bersama dengan keterbukaan komunikasi, pertemuan mencari solusi, dan mengungkapkan alternatif.

5. Model Komunikasi Unggul

Model komunikasi politik yang diproposisi dalam kajian ini adalah model komunikasi organisasi unggul (excellent organizational communication model). Dalam model ini dimulai dengan adanya komunikasi unggul (excellence communication) dan organisasi unggul (excellent organization). Komunikasi unggul terjadi ketika organisasi menggunakan komunikasi untuk mengelola hubungan dengan khalayak (stakeholder) yang beragam untuk mencapai pemahaman bersama, menyadari tujuan organisasi, dan melayani kepentingan public. Kemudian organisasi yang unggul (excellent organizations) adalah organisasi yang mampu memberdayakan struktur di bawahnya otonomi (giving autonomy) dan juga memberikannya kesempatan untuk membuat keputusan strategis (to make strategic decisions) keputusan bersifat terdesentralisasi, bukan tersentralisasi dan mengembangkan semangat inovatif (atau innovativeness) dalam berorganisasi

Peran Komunikasi dalam Sistem Politik

Komunikasi politik pada dasarnya tidak terlepas dari adanya peranan media massa. Media massa dalam hal ini dapat memberikan gambaran sejauh mana seluruh proses politik itu mampu terintegrasi dengan jaringan komunikasi sosial yang lebih luas. Melalui media massa masyarakat luas mendapatkan informasi mengenai masalah - masalah politik yang sedang terjadi. Peranan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik. Sesuai dengan tujuan komunikasi, maka tujuan strategi komunikasi politik itu adakalanya sekadar penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan public opinion (pendapat umum) dan bisa pula menghandel pendapat atau tuduhan lawan politik. Selanjutnya komunikasi politik bertujuan menarik simpatik khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

a. Membangun Citra Politik

Salah satu peranan strategi komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra politik itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual

b. Membentuk dan Membina Pendapat Umum

Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik, sangat ditentukan oleh peranan media politik terutama media massa. Memang pers, radio, film dan televisi, selain memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, menghubungkan dan menghibur, juga terutama membentuk citra politik dan pendapat umum yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik. Setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri, dan mengakui pentingnya sumber-sumber khusus; sedang saluran-saluran dan para pendengar akan berbeda menurut jenis media yang digunakan. Pendapat umum sebagai kekuatan politik tidak hanya mampu mendukung suatu pemerintahan atau kekuasaan, melainkan juga memiliki kekuatan untuk menggulingkannya. Seperti apa yang dialami oleh Soekarno, Soeharto dan Abd. Rahman Wahid, baik melalui cara yang konstitusional (melalui parlemen), maupun melalui pergolakan- pergolakan atau aksi-aksi massa, atau kedua-duanya (aksi massa dan parlemen). Sehingga pendapat umum harus dapat dibentuk, dipelihara, dibina dengan baik oleh semua kekuatan politik, melalui komunikasi politik yang intensif, persuasif ataupun informatif, edukatif dan koersif.

- c. Mendorong Partisipasi Politik Partisipasi politik sebagai peranan strategi komunikasi politik dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan politik (partisipasi politik). Sehingga salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah ketika seseorang mau memberikan suaranya untuk seorang politikus maupun partai politik tertentu dalam pemilihan umum. Sesuai dengan pendapat di atas mengenai tujuan komunikasi politik dapat diambil kesimpulan bahwa, tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan komunikator politik. Tujuan komunikasi politik secara umum terdiri dari tiga tujuan yaitu, membangun citra politik, membentuk dan membina pendapat umum, dan mendorong partisipasi politik.

SIMPULAN

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang memiliki muatan politik dengan tujuan memengaruhi pihak lain dalam mencapai tujuan tertentu. Komunikasi ini mencakup dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu komunikasi, serta melibatkan berbagai elemen seperti komunikator politik, pesan politik, media politik, sasaran politik, dan efek komunikasi politik. Para ahli memiliki definisi yang berbeda terkait komunikasi politik, tetapi secara umum, komunikasi politik adalah aktivitas yang berperan dalam sosialisasi politik, pembentukan opini publik, serta perebutan dan pelestarian kekuasaan. Model komunikasi politik juga beragam, mulai dari komunikasi deliberatif yang menekankan diskusi terbuka, komunikasi media yang bergantung pada peran media massa, hingga komunikasi multikultur yang menyesuaikan dengan keberagaman budaya.

Dalam sistem politik, komunikasi politik memiliki peran penting dalam membangun citra politik, membentuk pendapat umum, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Media massa menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi politik kepada publik, baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem politik maupun untuk membangun opini publik yang mendukung aktor politik tertentu. Selain itu, teori komunikasi politik, seperti teori khalayak kepala batu, teori empati dan hemofili, serta teori informasi dan nonverbal, membantu memahami bagaimana pesan politik diterima dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan psikologis. Dengan demikian, komunikasi politik tidak hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga alat strategis dalam pembentukan dan pengelolaan kekuasaan dalam suatu sistem politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Arifin, komunikasi politik filsafat-paradigma-teori-tujuan-strategi dan komunikasi politik Indonesia, Yogyakarta: Graha ilmu, 2011.
- Brian Mc Nair, Pengantar Komunikasi Politik, Nusamedia: Jakarta, 2016.
- Cangara, Hafied. 2016. Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cathcart, R., & Gumpert, G. (1983). Mediated interpersonal communication: Toward a new typology. *Quarterly Journal of Speech*, 69(3), 267-277.
- Dan nimmo, komunikasi politik, khalayak dan efek, (bandung : remaja karya, cv 1989.
- Fly Hunter, community power structure, (Chafe Hill, NC: University Of North Carolina Press, 1953.
- Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Heryanto, Gun Gun dan Rumar, Shulhan. Komunikasi Politik Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Garut, 2012.
- Gastil, John, & Black, Laura W., (2007) Public deliberation as the organizing principle of political communication research, *Journal of public deliberation*, vol. 4 issue 1, article 3.
- Leli Aryani, Komunikasi Politik Politisi Dan Pencitraan Di Panggung Politik, Bandung: Wijaya Padjajaran, 2010.
- Subakdi, Handoyo Prasetyo, PERANAN STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SERTA MENJAGA

PERDAMAIAAN, ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV)
Vol. 5, No. 1, 2023.
Sudianto, Komunikasi Politik, Jakarta : Rajawali press, 2006.